

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penguatan Regulasi Kebijakan

2.1.1.1 Pengertian Penguatan Regulasi Kebijakan

Penguatan regulasi kebijakan pada hakikatnya merupakan upaya sistematis untuk mempertegas, memperjelas, dan meningkatkan efektivitas aturan atau kebijakan agar mampu menjadi pedoman yang operasional dalam penyelenggaraan organisasi maupun pemerintahan. Dalam konteks administrasi publik dan manajemen pendidikan, regulasi tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mengarahkan perilaku aktor, menjamin kepastian hukum, serta memastikan tercapainya tujuan kelembagaan secara terukur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan regulasi kebijakan tidak sebatas pada pembentukan aturan baru, melainkan juga mencakup peninjauan, penyempurnaan, harmonisasi, implementasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut agar tetap relevan dengan dinamika sosial dan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, penguatan regulasi kebijakan menjadi bagian integral dari tata kelola yang baik (*good governance*), karena melalui regulasi yang kuat akan tercipta sistem kerja yang konsisten, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan.

Menurut Daryanto (2021: 45), penguatan regulasi kebijakan adalah proses penataan kembali norma dan aturan kelembagaan melalui penyempurnaan

substansi, struktur, dan mekanisme pelaksanaan agar kebijakan mampu berfungsi sebagai alat pengendali dan pengarah organisasi secara efektif. Sementara itu, Danim (2022: 88) menjelaskan bahwa penguatan regulasi kebijakan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya ikat dan daya guna kebijakan melalui konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga tidak terjadi kesenjangan implementasi. Selanjutnya, Sutrisno (2021: 112) menyatakan bahwa penguatan regulasi kebijakan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola organisasi dengan memperjelas standar operasional, pembagian kewenangan, serta sistem pengawasan sebagai bentuk pengendalian manajerial. Menurut Nugroho (2023: 67), penguatan regulasi kebijakan dipahami sebagai upaya integratif untuk memastikan kebijakan memiliki legitimasi hukum, dukungan politik, dan kapasitas implementasi yang memadai agar tujuan publik dapat tercapai secara optimal. Adapun Thoha (2021: 59) menegaskan bahwa penguatan regulasi kebijakan berkaitan dengan pembenahan sistem birokrasi melalui pembaruan aturan yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguatan regulasi kebijakan merupakan proses komprehensif yang melibatkan penyempurnaan substansi aturan, penegasan mekanisme pelaksanaan, peningkatan koordinasi antaraktor, serta penguatan sistem pengawasan agar kebijakan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga efektif secara implementatif. Penguatan ini menuntut konsistensi antara visi kelembagaan dengan perangkat regulasi yang mendukungnya, sehingga kebijakan mampu menjadi instrumen transformasi organisasi yang responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan regulasi yang

kuat, organisasi atau lembaga tidak hanya memiliki arah yang jelas, tetapi juga memiliki kepastian prosedural dan standar kerja yang mampu mendorong tercapainya tujuan secara optimal.

2.1.1.2 Tujuan Penguatan Regulasi Kebijakan

Tujuan penguatan regulasi kebijakan pada dasarnya diarahkan untuk membangun sistem pengelolaan organisasi yang lebih tertata, terarah, dan memiliki kepastian dalam setiap proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program. Dalam dinamika kelembagaan yang terus berkembang, regulasi sering kali memerlukan penyesuaian agar tetap relevan dengan kebutuhan internal dan tuntutan eksternal. Oleh karena itu, penguatan regulasi kebijakan bertujuan untuk memperbaiki substansi aturan, menyelaraskan berbagai ketentuan yang ada, serta memastikan bahwa kebijakan memiliki kejelasan arah dan daya ikat yang kuat. Dengan regulasi yang diperkuat, organisasi diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih kewenangan, meningkatkan koordinasi, serta menciptakan budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab. Selain itu, penguatan regulasi juga bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas sehingga setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral.

Menurut Dwiyanto (2021: 101), tujuan penguatan regulasi kebijakan adalah meningkatkan akuntabilitas publik melalui kejelasan standar pelayanan, indikator kinerja, dan mekanisme evaluasi yang terukur. Selanjutnya, Winarno (2022: 79) menjelaskan bahwa penguatan regulasi bertujuan menciptakan konsistensi antara rumusan kebijakan dan implementasinya agar kebijakan tidak

berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar operasional. Menurut Prasojo (2023: 66), tujuan penguatan regulasi kebijakan adalah membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif melalui penyederhanaan prosedur, harmonisasi aturan, serta peningkatan kapasitas aparatur. Sementara itu, Hamdi (2021: 54) menyatakan bahwa penguatan regulasi kebijakan diarahkan untuk memperkuat legitimasi kelembagaan dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan melalui sistem pengawasan yang efektif. Adapun Nawawi (2022: 92) menegaskan bahwa tujuan penguatan regulasi kebijakan adalah menciptakan integrasi kebijakan yang selaras dengan visi organisasi sehingga setiap unit kerja bergerak dalam kerangka tujuan yang sama.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan penguatan regulasi kebijakan mencakup upaya strategis untuk memperjelas arah kebijakan, meningkatkan konsistensi implementasi, memperkuat akuntabilitas, serta membangun sistem tata kelola yang transparan dan responsif. Penguatan regulasi tidak hanya berfungsi sebagai penyempurnaan aturan secara administratif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi kelembagaan yang mendorong efektivitas kerja dan kualitas pelayanan. Dengan regulasi yang kuat, terintegrasi, dan adaptif, organisasi akan memiliki fondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan.

2.1.1.3 Unsur Penguatan Regulasi Kebijakan

Unsur-unsur penguatan regulasi kebijakan merupakan komponen mendasar yang menentukan sejauh mana suatu kebijakan mampu berfungsi secara

efektif dalam praktik penyelenggaraan organisasi maupun pemerintahan. Penguatan regulasi tidak hanya berkaitan dengan pembaruan atau penambahan aturan, melainkan mencakup serangkaian elemen yang saling terintegrasi, mulai dari kejelasan substansi norma, legitimasi hukum, struktur kewenangan, mekanisme implementasi, hingga sistem pengawasan dan evaluasi. Tanpa adanya unsur-unsur yang lengkap dan saling mendukung, regulasi cenderung bersifat administratif semata dan tidak memiliki daya dorong yang kuat dalam mengarahkan perilaku organisasi. Oleh karena itu, memahami unsur-unsur penguatan regulasi kebijakan menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola yang tertib, konsisten, dan akuntabel. Unsur-unsur tersebut berfungsi sebagai fondasi agar kebijakan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga efektif secara substantif dan operasional.

Menurut Tachjan (2021: 58), unsur penguatan regulasi kebijakan meliputi kejelasan tujuan kebijakan, konsistensi norma hukum, serta dukungan kelembagaan yang memastikan implementasi berjalan sesuai desain kebijakan. Selanjutnya, Akib (2022: 73) menyatakan bahwa unsur utama dalam penguatan regulasi mencakup harmonisasi peraturan, kapasitas sumber daya pelaksana, serta sistem koordinasi antarlembaga yang efektif. Menurut Tahir (2021: 91), penguatan regulasi kebijakan memerlukan unsur legitimasi hukum, dukungan politik, serta partisipasi pemangku kepentingan agar kebijakan memiliki daya ikat yang kuat. Sementara itu, Zuhro (2023: 84) menegaskan bahwa unsur penting dalam penguatan regulasi adalah transparansi proses perumusan, akuntabilitas pelaksanaan, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Adapun Ramlan

Surbakti (2022: 69) menjelaskan bahwa penguatan regulasi kebijakan harus didukung oleh sistem pengawasan dan penegakan aturan yang konsisten guna menjamin kepatuhan dan efektivitas kebijakan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur penguatan regulasi kebijakan mencakup kejelasan tujuan, konsistensi norma hukum, legitimasi dan dukungan kelembagaan, kapasitas sumber daya, koordinasi antarlembaga, transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Seluruh unsur tersebut saling berkaitan dan membangun satu kesatuan sistem yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa kejelasan substansi dan dukungan struktur yang memadai, regulasi akan sulit diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan regulasi kebijakan harus dipahami sebagai proses menyeluruh yang membangun fondasi hukum, administratif, dan manajerial secara terpadu agar kebijakan mampu berjalan efektif, responsif, dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan organisasi maupun kepentingan publik.

2.1.2 Kebijakan Pendidikan

2.1.2.1 Pengertian Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan seperangkat keputusan strategis yang dirumuskan oleh pemerintah atau pemangku kepentingan pendidikan untuk mengarahkan penyelenggaraan pendidikan agar berjalan sistematis, terukur, dan sesuai dengan tujuan nasional. Kebijakan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendali mutu,

pemerataan, serta penguatan karakter peserta didik dalam konteks pembangunan sumber daya manusia.

Syafaruddin (2021:28) menjelaskan bahwa : ”Kebijakan pendidikan merupakan keputusan publik di bidang pendidikan yang dirumuskan secara rasional dan sistematis untuk menjawab permasalahan pendidikan serta mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan pendidikan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan pada berbagai jenjang”.

Sa’ud (2020:54) menyatakan bahwa :”Kebijakan pendidikan adalah seperangkat regulasi dan keputusan strategis yang mengatur arah penyelenggaraan pendidikan guna menjamin mutu, relevansi, dan akuntabilitas sistem pendidikan. Kebijakan tersebut menjadi dasar operasional bagi lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan pembelajaran”.

Mulyasa (2022:17) mengemukakan bahwa : “Kebijakan pendidikan merupakan keputusan formal yang dibuat oleh pemegang otoritas pendidikan untuk mengatur dan meningkatkan kualitas proses serta hasil pendidikan, termasuk pembinaan karakter peserta didik. Kebijakan ini berfungsi sebagai landasan normatif sekaligus pedoman teknis dalam pengelolaan satuan pendidikan”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah keputusan publik yang dirumuskan secara sistematis dan strategis untuk mengarahkan, mengatur, serta meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan pendidikan berfungsi sebagai pedoman

normatif dan operasional dalam mengelola sumber daya, proses pembelajaran, serta pembinaan karakter peserta didik. Dengan demikian, kebijakan pendidikan memiliki peran fundamental dalam menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional secara efektif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

2.1.2.2 Tahap Kebijakan Pendidikan

Tahap kebijakan pendidikan merupakan rangkaian proses sistematis yang dilalui dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan, hingga mengevaluasi suatu kebijakan di bidang pendidikan. Setiap kebijakan pendidikan tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan yang terstruktur dan rasional agar mampu menjawab permasalahan pendidikan secara tepat. Tahapan tersebut biasanya diawali dengan identifikasi masalah pendidikan, perumusan alternatif kebijakan, penetapan kebijakan, implementasi di lapangan, hingga evaluasi sebagai bentuk pengendalian dan perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks manajemen pendidikan modern, pemahaman terhadap tahapan kebijakan menjadi penting karena menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan serta keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dirancang melalui prosedur yang jelas, partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan mutu serta pembentukan karakter peserta didik.

Syafaruddin (2021:64) mengemukakan bahwa tahap awal kebijakan pendidikan antara lain :

1. Identifikasi masalah, yaitu proses analisis situasi pendidikan melalui pengumpulan data, observasi lapangan, serta kajian akademik untuk

menemukan akar persoalan yang sesungguhnya. Tahap ini sangat penting karena menentukan arah kebijakan yang akan dirumuskan.

2. Formulasi kebijakan, yaitu penyusunan berbagai alternatif solusi berdasarkan analisis kebutuhan dan pertimbangan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Formulasi harus mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya agar kebijakan bersifat realistis dan aplikatif.
3. Legitimasi atau penetapan kebijakan, yakni proses pengesahan kebijakan melalui mekanisme formal agar memiliki kekuatan hukum dan dapat diberlakukan secara resmi.
4. Implementasi kebijakan, yaitu pelaksanaan kebijakan oleh lembaga pendidikan dengan melibatkan seluruh sumber daya yang tersedia. Implementasi memerlukan koordinasi, komunikasi, dan komitmen yang kuat agar kebijakan tidak berhenti pada tataran dokumen.
5. Evaluasi, yang dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan kebijakan, mengukur kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk siklus kebijakan berikutnya.

Mulyasa (2022:45) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan diawali dengan tahap :

1. Perencanaan strategis, yaitu penetapan visi, misi, tujuan, serta indikator keberhasilan kebijakan pendidikan. Perencanaan harus disusun secara partisipatif dan berbasis data agar sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
2. Pengorganisasian sumber daya, yang mencakup penataan struktur organisasi, pembagian tugas, penyediaan anggaran, serta pemanfaatan sarana dan

prasarana pendidikan. Tanpa pengorganisasian yang baik, kebijakan akan sulit dijalankan secara efektif.

3. Pelaksanaan program, yaitu proses operasionalisasi kebijakan ke dalam kegiatan nyata seperti pembelajaran, pembinaan karakter, dan manajemen sekolah. Pada tahap ini diperlukan kepemimpinan yang kuat serta pengawasan yang konsisten.
4. Pengawasan dan penilaian hasil, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana serta memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan. Pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menilai kualitas hasil pendidikan.

Sa'ud (2020: 102) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan dimulai dari tahap antara lain :

1. Agenda setting, yaitu proses penetapan isu pendidikan sebagai prioritas kebijakan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat. Pada tahap ini dilakukan analisis konteks dan pemetaan kepentingan para pemangku kebijakan.
2. Perumusan kebijakan, yakni penyusunan alternatif tindakan melalui kajian akademik, konsultasi publik, dan analisis kelayakan.
3. Pengambilan keputusan, di mana alternatif terbaik dipilih dan ditetapkan sebagai kebijakan resmi melalui mekanisme hukum yang berlaku.
4. Implementasi, yang mencakup penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, serta petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan.

5. Monitoring dan evaluasi, yaitu proses pengawasan berkelanjutan untuk menilai efektivitas kebijakan, mengidentifikasi hambatan, serta memastikan keberlanjutan program pendidikan. Sa'ud menekankan pentingnya penggunaan data empiris dalam setiap tahap agar kebijakan tidak bersifat spekulatif.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahap kebijakan pendidikan merupakan proses berjenjang yang dimulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Setiap tahap memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pendidikan berjalan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan yang matang, implementasi yang konsisten, serta evaluasi yang objektif menjadi kunci keberhasilan kebijakan pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan membangun karakter peserta didik. Dengan demikian, tahapan kebijakan pendidikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi mekanisme pengendalian mutu dan instrumen perubahan dalam sistem pendidikan nasional.

2.1.2.3 Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Karakteristik kebijakan pendidikan merupakan ciri-ciri khusus yang membedakan kebijakan di bidang pendidikan dari kebijakan publik lainnya. Kebijakan pendidikan tidak hanya mengatur aspek administratif dan teknis penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga menyentuh dimensi nilai, ideologi, budaya, serta tujuan pembangunan manusia. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang kompleks karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, satuan pendidikan, pendidik, peserta

didik, dan masyarakat. Selain itu, kebijakan pendidikan bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan sosial. Pemahaman terhadap karakteristik kebijakan pendidikan menjadi penting agar proses perumusan dan implementasinya mampu menjawab kebutuhan nyata serta tetap sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

Mulyadi (2021:73) menjelaskan bahwa : "Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik sebagai kebijakan publik yang bersifat normatif, mengikat, dan berorientasi pada kepentingan umum. Kebijakan pendidikan tidak hanya berupa keputusan administratif, tetapi juga mengandung nilai dan standar yang harus dipatuhi oleh seluruh penyelenggara pendidikan. Selain itu, kebijakan pendidikan bersifat sistemik karena memengaruhi seluruh komponen dalam sistem pendidikan, mulai dari kurikulum, pendidik, hingga manajemen sekolah".

Musfah (2020: 58) menyatakan bahwa : "Karakteristik kebijakan pendidikan terletak pada sifatnya yang visioner, strategis, dan berorientasi jangka panjang. Kebijakan pendidikan dirancang untuk membangun kualitas sumber daya manusia di masa depan, sehingga tidak hanya berfokus pada hasil instan. Ia juga menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus adaptif terhadap perubahan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi:.

Komariah dan Triatna (2022: 41) mengemukakan bahwa : "Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik partisipatif dan kontekstual. Artinya, perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan sebaiknya melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar lebih responsif terhadap kebutuhan

lapangan. Selain itu, kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dan relevan”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kebijakan pendidikan mencakup sifat normatif dan mengikat, berorientasi pada kepentingan umum, bersifat sistemik, visioner, strategis, partisipatif, serta adaptif terhadap perubahan sosial. Kebijakan pendidikan tidak hanya mengatur aspek teknis penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga memuat nilai dan tujuan jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus dirancang secara komprehensif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menjamin keberlanjutan dan mutu sistem pendidikan nasional.

2.1.3 Kebijakan Kepala Sekolah

2.1.3.1 Pengertian Kebijakan Kepala Sekolah

Kebijakan kepala sekolah merupakan seperangkat keputusan strategis yang dirumuskan dan ditetapkan oleh kepala sekolah dalam rangka mengelola serta mengembangkan satuan pendidikan secara efektif. Dalam konteks manajemen pendidikan, kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan internal sekolah. Kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan kurikulum, pembinaan tenaga pendidik, penegakan tata tertib, hingga penguatan karakter peserta didik. Kebijakan kepala sekolah biasanya dituangkan

dalam bentuk peraturan, pedoman operasional, program kerja, maupun keputusan resmi yang bersifat mengikat bagi seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, kebijakan kepala sekolah menjadi instrumen penting dalam menciptakan iklim sekolah yang kondusif, meningkatkan mutu pendidikan, serta mewujudkan visi dan misi sekolah secara berkelanjutan.

Priansa (2021: 112) menjelaskan bahwa : "Kebijakan kepala sekolah adalah keputusan manajerial yang diambil oleh kepala sekolah dalam rangka mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh sumber daya sekolah guna mencapai tujuan pendidikan. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan program sekolah serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di tingkat satuan pendidikan".

Danim dan Khairil (2020:89) menyatakan bahwa : "Kebijakan kepala sekolah merupakan bentuk kepemimpinan strategis yang diwujudkan melalui penetapan aturan dan program sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kinerja organisasi sekolah. Kebijakan ini mencerminkan visi, nilai, dan gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola lembaga pendidikan".

Rusdiana (2022: 57) mengemukakan bahwa : "Kebijakan kepala sekolah adalah keputusan formal yang dirumuskan berdasarkan kebutuhan sekolah dan regulasi yang berlaku, kemudian diimplementasikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah. Kebijakan tersebut bersifat kontekstual, artinya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lingkungan sekolah masing-masing".

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kepala sekolah merupakan keputusan strategis dan manajerial yang ditetapkan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin satuan pendidikan untuk mengatur, mengarahkan, dan mengoptimalkan seluruh sumber daya sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai pedoman operasional, mencerminkan visi serta kepemimpinan kepala sekolah, dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik sekolah. Dengan demikian, kebijakan kepala sekolah memiliki peran sentral dalam menciptakan tata kelola sekolah yang efektif, meningkatkan mutu pendidikan, serta mendukung pembentukan karakter peserta didik secara berkelanjutan.

2.1.3.2 Model Kebijakan Kepala Sekolah

Model kebijakan kepala sekolah merupakan pola atau kerangka konseptual yang digunakan oleh kepala sekolah dalam merumuskan, menetapkan, dan mengimplementasikan kebijakan di lingkungan satuan pendidikan. Model ini menggambarkan pendekatan yang dipilih kepala sekolah dalam proses pengambilan keputusan, apakah bersifat partisipatif, rasional, strategis, kolaboratif, atau berbasis data. Dalam praktiknya, model kebijakan kepala sekolah sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan, budaya organisasi sekolah, regulasi yang berlaku, serta dinamika kebutuhan peserta didik dan tenaga pendidik. Model kebijakan yang tepat akan menentukan efektivitas pelaksanaan program sekolah dan keberhasilan pencapaian visi serta misi lembaga pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai model kebijakan kepala sekolah menjadi penting sebagai landasan dalam membangun tata kelola sekolah yang adaptif, responsif,

dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan serta pembentukan karakter peserta didik.

Model kebijakan menurut Rusdiana (2015: 82–90) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Model Rasional (*Rational Model*)

Model rasional menekankan proses pengambilan keputusan yang sistematis dan logis. Dalam model ini, pembuat kebijakan terlebih dahulu mengidentifikasi masalah secara jelas, menetapkan tujuan yang ingin dicapai, menyusun berbagai alternatif solusi, kemudian mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan kriteria tertentu sebelum memilih keputusan terbaik. Model ini mengasumsikan bahwa pengambil kebijakan memiliki informasi yang cukup dan mampu bertindak secara objektif. Dalam konteks pendidikan, kepala sekolah yang menggunakan model rasional akan mendasarkan kebijakannya pada data, analisis kebutuhan sekolah, serta pertimbangan efektivitas dan efisiensi program.

2. Model Inkremental (*Incremental Model*)

Model inkremental melihat kebijakan sebagai kelanjutan atau penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya. Rusdiana menjelaskan bahwa dalam praktiknya, pengambil kebijakan sering kali tidak memulai dari nol, melainkan melakukan perubahan kecil secara bertahap sesuai kondisi dan keterbatasan yang ada. Model ini lebih realistis karena mempertimbangkan faktor politik, sumber daya, serta dinamika organisasi. Dalam lingkungan sekolah, kepala sekolah dapat menggunakan model ini dengan melakukan perbaikan bertahap terhadap

tata tertib, kurikulum, atau program pembinaan tanpa mengubah sistem secara drastis.

3. Model Campuran (*Mixed Scanning Model*)

Model campuran merupakan kombinasi antara model rasional dan inkremental. Dalam model ini, pengambil kebijakan melakukan analisis secara menyeluruh terhadap arah kebijakan utama (strategis), namun implementasinya dilakukan secara bertahap dan fleksibel. Rusdiana menilai bahwa model ini lebih adaptif karena memungkinkan adanya perencanaan jangka panjang sekaligus penyesuaian terhadap situasi nyata di lapangan. Dalam konteks sekolah, kepala sekolah dapat merumuskan visi kebijakan jangka panjang, misalnya penguatan karakter peserta didik, kemudian melaksanakannya melalui program-program bertahap yang dievaluasi secara berkala.

4. Model Sistem (*System Model*)

Model sistem memandang kebijakan sebagai bagian dari suatu sistem yang saling berhubungan antara input, proses, output, dan umpan balik (*feedback*). Kebijakan lahir dari tuntutan lingkungan (input), diproses melalui mekanisme organisasi, menghasilkan keputusan (output), dan kemudian dievaluasi melalui respons masyarakat atau warga sekolah sebagai umpan balik. Dalam perspektif ini, kepala sekolah perlu mempertimbangkan faktor internal dan eksternal sekolah sebelum menetapkan kebijakan agar terjadi keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan tuntutan lingkungan.

Wahab (2017: 40–48) menjelaskan bahwa model kebijakan antara lain :

1. Model elit, kebijakan pada dasarnya ditentukan oleh sekelompok kecil pihak yang memiliki otoritas atau kekuasaan. Dalam konteks pendidikan, model ini dapat terlihat ketika keputusan strategis sepenuhnya berada di tangan pimpinan lembaga atau pejabat tertentu tanpa keterlibatan luas dari pihak lain. Model ini menekankan sentralisasi keputusan dan biasanya digunakan ketika dibutuhkan keputusan cepat serta tegas.
2. Model kelompok memandang kebijakan sebagai hasil interaksi dan kompromi antar kelompok kepentingan. Dalam pendidikan, kebijakan dapat lahir dari dinamika antara kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua. Model ini menekankan proses negosiasi serta keseimbangan kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterima oleh berbagai pihak.

Agustino (2020: 73–85) menjelaskan bahwa model kebijakan terdiri dari :

1. Model institusional memandang kebijakan sebagai produk lembaga resmi yang memiliki kewenangan hukum. Artinya, kebijakan dianggap sah apabila ditetapkan oleh institusi yang berwenang. Dalam konteks sekolah, kebijakan kepala sekolah memperoleh legitimasi karena ditetapkan oleh otoritas formal dalam struktur organisasi pendidikan.
2. Model proses melihat kebijakan sebagai rangkaian tahapan yang berkelanjutan, mulai dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, hingga evaluasi. Model ini menekankan pentingnya keteraturan dan sistematika dalam setiap tahap agar kebijakan berjalan efektif.

3. Model rasional-komprehensif, kebijakan dirumuskan melalui analisis menyeluruh terhadap berbagai alternatif solusi, dengan mempertimbangkan tujuan, sumber daya, serta dampak kebijakan. Model ini mengutamakan logika, data, dan perencanaan sistematis.
4. Model inkremental memandang kebijakan sebagai hasil perubahan kecil dari kebijakan sebelumnya. Pengambil keputusan tidak melakukan perubahan besar secara drastis, melainkan melakukan penyesuaian bertahap sesuai kondisi yang berkembang. Model ini dinilai lebih realistis dalam menghadapi keterbatasan informasi dan sumber daya.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa model kebijakan kepala sekolah merupakan pendekatan atau pola yang digunakan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Model tersebut dapat bersifat partisipatif, rasional-strategis, maupun berbasis budaya sekolah, tergantung pada kebutuhan dan konteks lembaga pendidikan. Pemilihan model yang tepat akan memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan serta tingkat penerimaan warga sekolah terhadap keputusan yang diambil. Dengan demikian, model kebijakan kepala sekolah memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola sekolah yang demokratis, sistematis, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

2.1.3.3 Tahapan-Tahapan Kebijakan Kepala Sekolah

Tahapan-tahapan kebijakan kepala sekolah merupakan rangkaian proses sistematis yang dilakukan dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Sebagai pemimpin lembaga

pendidikan, kepala sekolah memiliki kewenangan strategis dalam mengambil keputusan yang berdampak langsung terhadap mutu pembelajaran, budaya sekolah, serta pembentukan karakter peserta didik. Namun demikian, kebijakan yang efektif tidak dapat dibuat secara spontan atau berdasarkan intuisi semata, melainkan harus melalui tahapan yang terencana dan terstruktur. Tahapan tersebut umumnya mencakup identifikasi permasalahan sekolah, analisis kebutuhan, perumusan alternatif kebijakan, penetapan keputusan, implementasi program, serta evaluasi dan tindak lanjut. Dengan melalui tahapan yang jelas, kebijakan kepala sekolah akan memiliki arah yang terukur, legitimasi yang kuat, serta peluang keberhasilan yang lebih besar dalam mencapai tujuan pendidikan.

Wahjosumidjo (2018: 212–215) menjelaskan bahwa dalam konteks kepemimpinan sekolah, tahapan kebijakan kepala sekolah meliputi:

1. pengenalan dan perumusan masalah,

Tahap pengenalan dan perumusan masalah merupakan langkah awal yang sangat menentukan arah kebijakan kepala sekolah. Pada tahap ini, kepala sekolah melakukan identifikasi terhadap berbagai persoalan yang muncul di lingkungan sekolah, baik yang berkaitan dengan akademik, kedisiplinan, kinerja guru, manajemen administrasi, maupun budaya sekolah. Proses ini dapat dilakukan melalui observasi langsung, supervisi kelas, rapat evaluasi, laporan guru, masukan dari peserta didik dan orang tua, serta analisis hasil belajar siswa. Permasalahan yang ditemukan kemudian dirumuskan secara jelas dan spesifik agar tidak menimbulkan multitafsir. Perumusan masalah yang tepat akan membantu kepala sekolah menentukan fokus kebijakan serta

menghindari keputusan yang bersifat umum dan kurang menyentuh akar persoalan.

2. analisis situasi dan pengumpulan data, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis fakta;

Setelah masalah dirumuskan, kepala sekolah melakukan analisis situasi secara mendalam dengan mengumpulkan data yang relevan. Data tersebut dapat berupa data kuantitatif, seperti nilai akademik, tingkat kehadiran siswa, atau hasil survei, maupun data kualitatif seperti hasil wawancara, diskusi kelompok, dan catatan observasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui penyebab utama permasalahan, faktor pendukung dan penghambat, serta kondisi internal dan eksternal sekolah. Dengan pendekatan berbasis data, kepala sekolah dapat menghindari pengambilan keputusan yang subjektif atau berdasarkan asumsi semata. Tahap ini juga membantu dalam memetakan kebutuhan prioritas sehingga kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kondisi nyata sekolah.

3. penentuan alternatif solusi, dengan mempertimbangkan dampak dan sumber daya yang tersedia;

Pada tahap ini, kepala sekolah menyusun berbagai alternatif solusi yang memungkinkan untuk mengatasi permasalahan yang telah dianalisis. Setiap alternatif dipertimbangkan secara matang dengan melihat aspek efektivitas, efisiensi, dampak jangka pendek dan jangka panjang, serta ketersediaan sumber daya seperti tenaga pendidik, anggaran, sarana prasarana, dan waktu. Kepala sekolah dapat melibatkan wakil kepala sekolah, guru, dan komite

sekolah dalam proses diskusi untuk memperoleh masukan yang komprehensif. Dengan mempertimbangkan berbagai alternatif, kepala sekolah memiliki pilihan yang lebih rasional dan tidak terfokus pada satu solusi saja. Tahap ini menekankan pentingnya pertimbangan strategis agar kebijakan yang dipilih dapat dilaksanakan secara optimal.

4. pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan secara formal; serta

Setelah alternatif solusi dianalisis, kepala sekolah menentukan pilihan terbaik dan menetapkannya sebagai kebijakan resmi sekolah. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Kebijakan yang telah diputuskan kemudian dituangkan dalam bentuk formal, seperti surat keputusan, peraturan sekolah, atau pedoman pelaksanaan program. Penetapan secara formal memberikan legitimasi serta kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan. Pada tahap ini, penting pula dilakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah agar kebijakan dipahami dan dilaksanakan secara konsisten.

5. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Tahap terakhir adalah pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Kepala sekolah melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat dilakukan melalui supervisi, laporan berkala, rapat evaluasi, maupun penilaian kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakan serta mengidentifikasi kendala yang muncul selama pelaksanaan. Jika ditemukan kekurangan, kepala sekolah

dapat melakukan perbaikan atau penyesuaian kebijakan. Dengan adanya pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, kebijakan sekolah dapat terus disempurnakan sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik.

Sagala (2020: 156–160) mengemukakan bahwa tahapan kebijakan kepala sekolah dimulai dari :

1. Tahap perencanaan strategis, yaitu menetapkan visi, tujuan, serta indikator keberhasilan kebijakan.

Tahap perencanaan strategis merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan kepala sekolah. Pada tahap ini, kepala sekolah menetapkan visi yang ingin dicapai melalui kebijakan yang dirumuskan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tujuan yang lebih operasional dan terukur agar mudah dipahami serta dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Selain itu, kepala sekolah juga menentukan indikator keberhasilan sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu mencapai sasaran yang diharapkan. Indikator ini dapat berupa peningkatan hasil belajar, perbaikan kedisiplinan siswa, peningkatan partisipasi guru, atau terciptanya budaya sekolah yang positif. Dalam perencanaan strategis, kepala sekolah perlu mempertimbangkan kondisi internal sekolah, tantangan.

2. Pengorganisasian, yaitu mengalokasikan tugas dan tanggung jawab kepada guru serta tenaga kependidikan.

Tahap pengorganisasian merupakan proses penataan sumber daya manusia dan sarana pendukung agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Kepala sekolah mengalokasikan tugas dan tanggung jawab kepada guru, wakil kepala sekolah, wali kelas, serta tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya. Pembagian tugas ini harus dilakukan secara jelas dan terstruktur untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan maupun kekosongan tanggung jawab. Selain itu, kepala sekolah juga menetapkan mekanisme koordinasi dan komunikasi antarbagian agar pelaksanaan kebijakan berjalan selaras dan terintegrasi. Pengorganisasian yang efektif mencerminkan kemampuan manajerial kepala sekolah dalam membangun kerja sama tim serta menciptakan suasana kerja yang kondusif dan profesional.

3. Tahap pelaksanaan kebijakan dalam bentuk program nyata di sekolah.

Tahap pelaksanaan merupakan implementasi konkret dari kebijakan yang telah direncanakan dan diorganisasikan. Pada tahap ini, kebijakan diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan, atau aturan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Misalnya, kebijakan peningkatan karakter peserta didik dapat diwujudkan melalui program pembiasaan, kegiatan ekstrakurikuler, penguatan tata tertib, atau integrasi nilai karakter dalam pembelajaran. Kepala sekolah berperan sebagai pengarah sekaligus pengendali agar pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Keberhasilan tahap ini sangat bergantung pada komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan

kebijakan secara konsisten. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan kepemimpinan yang inspiratif menjadi kunci dalam memastikan kebijakan benar-benar terlaksana secara optimal.

4. Evaluasi dan pengendalian, yaitu menilai efektivitas kebijakan serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Tahap evaluasi dan pengendalian bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah dijalankan. Kepala sekolah melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan program dengan membandingkan capaian yang diperoleh dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Evaluasi dapat dilakukan melalui analisis data, supervisi, rapat evaluasi, maupun umpan balik dari guru dan peserta didik. Jika ditemukan kendala atau ketidaksesuaian, kepala sekolah melakukan pengendalian dengan cara memberikan arahan perbaikan, melakukan penyesuaian strategi, atau merevisi kebijakan bila diperlukan. Tahap ini menegaskan bahwa kebijakan bukanlah keputusan yang bersifat statis, melainkan proses dinamis yang memerlukan perbaikan berkelanjutan agar tetap relevan dan efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan serta membangun karakter peserta didik.

Kompri (2021: 93–99) menjelaskan bahwa tahapan kebijakan kepala sekolah terdiri atas:

1. Identifikasi kebutuhan sekolah berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal;

Tahap ini merupakan langkah awal yang bertujuan untuk memahami secara menyeluruh kondisi nyata sekolah. Analisis lingkungan internal mencakup

evaluasi terhadap sumber daya manusia (kompetensi guru dan tenaga kependidikan), karakteristik peserta didik, sarana dan prasarana, budaya sekolah, serta sistem manajemen yang berjalan. Sementara itu, analisis lingkungan eksternal meliputi faktor-faktor di luar sekolah seperti kebijakan pemerintah, tuntutan kurikulum nasional, harapan orang tua, perkembangan teknologi, serta dinamika sosial masyarakat. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal secara komprehensif, kepala sekolah dapat mengidentifikasi kebutuhan prioritas serta tantangan yang harus direspons melalui kebijakan. Tahap ini penting agar kebijakan yang disusun benar-benar berbasis kebutuhan riil dan tidak terlepas dari konteks lingkungan sekolah.

2. Perumusan kebijakan yang selaras dengan visi dan misi sekolah; sosialisasi kebijakan kepada seluruh warga sekolah untuk membangun pemahaman bersama;

Setelah kebutuhan teridentifikasi, kepala sekolah merumuskan kebijakan yang sejalan dengan visi dan misi sekolah. Kebijakan yang baik harus mendukung arah pengembangan sekolah serta memperkuat tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Dalam proses perumusan, kepala sekolah perlu mempertimbangkan nilai-nilai dasar sekolah, regulasi yang berlaku, serta aspirasi warga sekolah. Setelah kebijakan dirumuskan dan ditetapkan, langkah berikutnya adalah sosialisasi. Sosialisasi dilakukan melalui rapat, forum diskusi, edaran resmi, maupun media komunikasi sekolah agar seluruh warga sekolah memahami tujuan, isi, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan. Proses ini bertujuan membangun komitmen bersama sehingga kebijakan tidak hanya

menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi pedoman yang dipahami dan dijalankan secara kolektif.

3. Implementasi kebijakan melalui kegiatan operasional;

Tahap implementasi merupakan tahap penerapan kebijakan dalam bentuk tindakan nyata di sekolah. Kebijakan diterjemahkan ke dalam program kerja, prosedur operasional, atau kegiatan rutin yang melibatkan seluruh unsur sekolah. Pada tahap ini, pembagian tugas dan tanggung jawab harus jelas agar setiap pihak mengetahui perannya. Kepala sekolah berfungsi sebagai pengarah, koordinator, sekaligus pengawas agar kegiatan operasional berjalan sesuai rencana. Implementasi yang efektif memerlukan komunikasi yang lancar, koordinasi yang baik, serta dukungan sumber daya yang memadai. Konsistensi dalam pelaksanaan menjadi faktor kunci agar kebijakan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan mutu sekolah.

4. Monitoring dan evaluasi untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan telah dilaksanakan dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Monitoring bersifat berkelanjutan dan dilakukan selama proses pelaksanaan berlangsung, sedangkan evaluasi dilakukan secara periodik untuk mengukur hasil dan dampak kebijakan. Kepala sekolah dapat menggunakan berbagai instrumen seperti laporan kinerja, hasil supervisi, data akademik, maupun umpan balik dari guru dan peserta didik. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian kebijakan. Dengan demikian,

kebijakan bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan kondisi sekolah, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahapan kebijakan kepala sekolah merupakan proses berjenjang yang mencakup identifikasi masalah, perencanaan dan perumusan kebijakan, pengorganisasian serta sosialisasi, implementasi program, hingga evaluasi dan tindak lanjut. Meskipun terdapat variasi istilah di antara para ahli, secara substansi mereka sepakat bahwa kebijakan kepala sekolah harus melalui tahapan yang sistematis dan berbasis analisis agar efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian, tahapan kebijakan kepala sekolah bukan hanya prosedur administratif, tetapi merupakan mekanisme manajerial yang menentukan keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan serta membangun karakter peserta didik secara berkelanjutan.

2.1.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Kepala Sekolah

Faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan kepala sekolah merupakan aspek penting yang menentukan arah, kualitas, dan keberhasilan suatu kebijakan di satuan pendidikan. Kebijakan kepala sekolah tidak lahir dalam ruang yang kosong, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kondisi internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi kompetensi kepala sekolah, gaya kepemimpinan, budaya organisasi sekolah, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Sementara itu, faktor eksternal mencakup regulasi pemerintah, tuntutan kurikulum nasional, harapan masyarakat dan orang tua, perkembangan teknologi, serta dinamika sosial budaya di lingkungan sekitar

sekolah. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting agar kebijakan yang dirumuskan bersifat kontekstual, realistis, dan adaptif terhadap perubahan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, kepala sekolah dapat mengambil keputusan yang tepat dan mampu menjawab kebutuhan sekolah secara komprehensif.

Mulyasa (2021: 98–102) menjelaskan bahwa kebijakan kepala sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan faktor utama yang sangat menentukan arah dan kualitas kebijakan kepala sekolah. Gaya kepemimpinan yang diterapkan akan memengaruhi cara kepala sekolah dalam mengambil keputusan, melibatkan warga sekolah, serta mengelola perubahan. Kepala sekolah yang memiliki kepemimpinan visioner cenderung mampu merumuskan kebijakan yang inovatif dan berorientasi jangka panjang. Sementara itu, kepemimpinan partisipatif mendorong keterlibatan guru dan tenaga kependidikan dalam proses perumusan kebijakan sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Selain itu, kepemimpinan yang tegas dan konsisten diperlukan agar kebijakan dapat dijalankan secara disiplin dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal. Dengan demikian, kualitas kepemimpinan kepala sekolah akan berbanding lurus dengan efektivitas kebijakan yang dihasilkan.

2. Kompetensi manajerial

Kompetensi manajerial mencerminkan kemampuan kepala sekolah dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan

seluruh sumber daya sekolah. Kepala sekolah yang memiliki kompetensi manajerial yang baik akan mampu menyusun kebijakan secara sistematis, berbasis data, dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dalam perencanaan kebijakan, kompetensi ini terlihat dari kemampuan menganalisis masalah secara komprehensif dan menetapkan prioritas program. Dalam tahap pengorganisasian, kepala sekolah harus mampu membagi tugas secara proporsional dan membangun koordinasi yang efektif. Sementara dalam pengendalian, kompetensi manajerial tercermin melalui kemampuan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Tanpa kompetensi manajerial yang memadai, kebijakan yang dirumuskan berpotensi tidak berjalan optimal meskipun secara konsep sudah baik.

3. Kondisi sumber daya sekolah.

Kondisi sumber daya sekolah juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kebijakan kepala sekolah. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta dukungan lingkungan sekolah. Jika sekolah memiliki guru yang kompeten dan tenaga kependidikan yang profesional, maka kebijakan yang dirancang akan lebih mudah diimplementasikan. Demikian pula ketersediaan anggaran dan fasilitas yang memadai akan mendukung kelancaran pelaksanaan program. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya dapat membatasi ruang gerak kebijakan sehingga kepala sekolah perlu menyesuaikan kebijakan dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang realistis dan mempertimbangkan kapasitas sumber daya sekolah secara menyeluruh.

Kompri (2020: 115–120) menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi kebijakan kepala sekolah terdiri atas :

1. Faktor internal meliputi visi dan misi sekolah, struktur organisasi, kemampuan tenaga pendidik, serta ketersediaan anggaran.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam lingkungan sekolah dan secara langsung berada di bawah kendali manajemen kepala sekolah.

a. Visi dan Misi Sekolah

Visi dan misi sekolah menjadi pedoman utama dalam merumuskan kebijakan. Visi menggambarkan arah dan cita-cita jangka panjang sekolah, sedangkan misi menjabarkan langkah-langkah strategis untuk mencapainya. Setiap kebijakan yang ditetapkan kepala sekolah harus selaras dengan visi dan misi tersebut agar tidak menyimpang dari tujuan utama lembaga. Jika visi sekolah berorientasi pada pembentukan karakter dan prestasi akademik, maka kebijakan yang diambil pun harus mendukung penguatan karakter, peningkatan mutu pembelajaran, serta pengembangan potensi peserta didik. Dengan demikian, visi dan misi berfungsi sebagai landasan normatif sekaligus arah strategis dalam pengambilan keputusan.

b. Struktur Organisasi Sekolah

Struktur organisasi menentukan pola koordinasi, pembagian tugas, serta jalur komunikasi dalam sekolah. Kebijakan kepala sekolah akan dipengaruhi oleh bagaimana struktur tersebut berjalan. Struktur yang jelas dan efektif memudahkan implementasi kebijakan karena setiap unsur

memahami peran dan tanggung jawabnya. Sebaliknya, struktur yang tidak tertata dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau hambatan koordinasi, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu menyesuaikan kebijakan dengan sistem organisasi yang ada agar dapat dijalankan secara terintegrasi.

c. Kemampuan Tenaga Pendidik

Kompetensi guru dan tenaga kependidikan sangat memengaruhi keberhasilan kebijakan. Kebijakan yang berkaitan dengan inovasi pembelajaran, penggunaan teknologi, atau penguatan karakter memerlukan dukungan guru yang profesional dan adaptif. Jika kemampuan tenaga pendidik tinggi, kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Namun, jika kompetensi masih terbatas, kepala sekolah perlu mempertimbangkan program pelatihan atau pendampingan sebelum menetapkan kebijakan yang bersifat kompleks. Dengan demikian, kemampuan tenaga pendidik menjadi pertimbangan penting dalam menentukan bentuk dan tingkat kebijakan.

d. Ketersediaan Anggaran

Anggaran merupakan faktor pendukung utama dalam pelaksanaan kebijakan. Setiap program yang dirancang memerlukan pembiayaan, baik untuk pengadaan sarana, pelatihan, maupun kegiatan operasional. Kepala sekolah harus memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan sekolah. Perencanaan anggaran yang matang akan membantu kebijakan berjalan secara efektif dan berkelanjutan, sedangkan

keterbatasan dana menuntut kepala sekolah untuk menetapkan prioritas serta melakukan pengelolaan yang efisien.

2. Faktor eksternal mencakup kebijakan pemerintah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta partisipasi masyarakat.

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar sekolah dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh kepala sekolah, namun sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil.

- a. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan menjadi acuan utama bagi kepala sekolah. Regulasi terkait kurikulum, standar nasional pendidikan, sistem evaluasi, serta program prioritas nasional harus dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan sekolah. Kepala sekolah tidak dapat menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kebijakan pemerintah sangat penting agar kebijakan sekolah tetap berada dalam koridor hukum dan mendukung program nasional pendidikan.

- b. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan IPTEK membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, terutama dalam metode pembelajaran dan sistem administrasi. Kepala sekolah perlu menyesuaikan kebijakan dengan kemajuan teknologi, misalnya dalam penerapan pembelajaran digital, penggunaan platform daring, atau sistem informasi manajemen sekolah. Jika tidak responsif terhadap perkembangan ini, sekolah dapat tertinggal dan kurang

mampu bersaing. Oleh sebab itu, faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pertimbangan strategis dalam perumusan kebijakan.

c. Partisipasi Masyarakat

Sekolah merupakan bagian dari masyarakat, sehingga dukungan dan partisipasi masyarakat turut memengaruhi kebijakan kepala sekolah. Orang tua, komite sekolah, serta lingkungan sekitar memiliki peran dalam mendukung program sekolah, baik secara moral maupun material. Tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Kepala sekolah perlu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar kebijakan yang diambil mendapat dukungan luas dan berjalan secara efektif.

Sagala (2019: 143–147) berpendapat bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan kepala sekolah:

1. Lingkungan Strategis Pendidikan

Lingkungan strategis pendidikan mencakup kondisi makro yang memengaruhi arah dan kebijakan sekolah, seperti kebijakan nasional, standar pendidikan, dinamika kurikulum, serta perkembangan global dalam dunia pendidikan. Kepala sekolah harus memahami konteks strategis ini agar kebijakan yang dibuat tidak terlepas dari arah pembangunan pendidikan secara nasional maupun global. Lingkungan strategis juga meliputi kondisi demografis peserta didik, karakteristik wilayah, serta kebutuhan masyarakat sekitar. Dengan mempertimbangkan lingkungan strategis, kepala sekolah dapat merumuskan kebijakan yang relevan, kontekstual, dan memiliki daya saing.

2. Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti perubahan pola asuh, perkembangan budaya digital, serta pergeseran nilai dan norma, turut memengaruhi kebijakan sekolah. Peserta didik hidup dalam lingkungan sosial yang terus berubah, sehingga sekolah perlu menyesuaikan kebijakan agar tetap responsif terhadap realitas tersebut. Misalnya, meningkatnya penggunaan media sosial menuntut adanya kebijakan literasi digital dan etika bermedia. Kepala sekolah harus mampu membaca dinamika sosial agar kebijakan yang dibuat tidak ketinggalan zaman dan mampu membangun karakter peserta didik sesuai kebutuhan era.

3. Tuntutan Mutu Pendidikan

Meningkatnya ekspektasi terhadap kualitas pendidikan menjadi faktor penting dalam perumusan kebijakan kepala sekolah. Orang tua dan masyarakat mengharapkan hasil belajar yang tinggi, layanan pendidikan yang profesional, serta lulusan yang kompeten dan berkarakter. Tuntutan mutu ini mendorong kepala sekolah untuk menetapkan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, serta perbaikan sistem evaluasi. Dengan demikian, kebijakan yang diambil harus mengarah pada peningkatan standar mutu secara berkelanjutan.

4. Persaingan Antar Lembaga Pendidikan

Persaingan antar sekolah, baik negeri maupun swasta, turut memengaruhi kebijakan kepala sekolah. Dalam situasi kompetitif, sekolah dituntut untuk memiliki keunggulan tertentu agar diminati masyarakat. Persaingan ini dapat

mendorong inovasi dalam program unggulan, peningkatan fasilitas, maupun strategi promosi sekolah. Kepala sekolah perlu merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan daya tarik dan reputasi sekolah tanpa mengabaikan prinsip mutu dan integritas pendidikan.

5. Faktor Komunikasi

Komunikasi yang efektif menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan. Proses perumusan, sosialisasi, dan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kejelasan informasi yang disampaikan kepada guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua. Kurangnya komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman dan resistensi terhadap kebijakan. Oleh karena itu, kepala sekolah harus membangun sistem komunikasi yang terbuka, transparan, dan partisipatif agar setiap kebijakan dapat dipahami dan dijalankan dengan baik.

6. Partisipasi Warga Sekolah

Partisipasi warga sekolah, termasuk guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik, memengaruhi efektivitas kebijakan kepala sekolah. Kebijakan yang dirumuskan dengan melibatkan berbagai pihak cenderung lebih diterima dan didukung dalam pelaksanaannya. Partisipasi juga menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah perlu mendorong budaya kolaboratif dan musyawarah agar kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan bersama dan dapat diimplementasikan secara optimal.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan kepala sekolah mencakup dimensi internal seperti kompetensi kepemimpinan, budaya sekolah, sumber daya, serta visi organisasi, dan dimensi eksternal seperti regulasi pemerintah, tuntutan masyarakat, serta dinamika perkembangan pendidikan. Pendapat tersebut menegaskan bahwa kebijakan kepala sekolah merupakan hasil interaksi antara kapasitas personal pemimpin dan kondisi lingkungan yang melingkupinya. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan analitis, manajerial, dan adaptif agar mampu merumuskan kebijakan yang tepat, kontekstual, serta berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan membangun karakter peserta didik.

2.1.4 Membangun Karakter Peserta Didik

2.1.4.1 Pengertian Karakter Peserta Didik

Karakter peserta didik merupakan aspek penting dalam proses pendidikan karena berkaitan dengan pembentukan kepribadian, nilai-nilai moral, sikap, serta perilaku yang akan menentukan kualitas individu dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter tidak hanya menekankan aspek kognitif atau kemampuan akademik semata, tetapi juga aspek afektif dan sosial yang mencakup kejujuran, tanggung jawab, disiplin, empati, dan rasa hormat terhadap orang lain. Pembentukan karakter pada peserta didik menjadi tanggung jawab bersama antara guru, orang tua, dan sekolah, termasuk melalui kebijakan kepala sekolah, lingkungan belajar, serta interaksi sosial di sekolah. Karakter yang kuat pada

peserta didik diyakini akan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, menyiapkan generasi yang berkompetensi tinggi, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan di masyarakat.

Mulyasa (2020: 55–57) menyatakan bahwa : Karakter peserta didik adalah sekumpulan sifat, nilai, dan kebiasaan yang dimiliki anak dan tercermin dalam tingkah laku sehari-hari. Karakter ini dibentuk melalui pendidikan formal di sekolah, pengalaman sosial, serta interaksi dengan lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu pentingnya integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran agar peserta didik mampu menerapkannya secara konsisten dalam tindakan nyata.

Ahmad (2021: 68–71) mengemukakan bahwa : Karakter peserta didik mencakup dimensi moral, sosial, dan emosional yang membangun kepribadian individu. Pembentukan karakter bukan sekadar penanaman nilai, tetapi juga pengembangan kemampuan berpikir kritis, pengendalian diri, serta empati terhadap sesama. Karakter yang baik akan membekali peserta didik untuk mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Suyanto (2019: 102–106) berpendapat bahwa Karakter peserta didik adalah hasil internalisasi nilai-nilai budaya, agama, dan norma sosial yang memengaruhi sikap, perilaku, dan cara berpikir anak. Ia menekankan bahwa pembentukan karakter harus dilakukan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, serta interaksi

sosial di sekolah. Dengan demikian, karakter tidak hanya bersifat teori, tetapi tercermin dalam perilaku nyata peserta didik.

Hidayat (2020: 44–49) menjelaskan bahwa : Karakter peserta didik adalah kualitas personal yang memandu individu dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan norma yang berlaku. Karakter ini meliputi tanggung jawab, kejujuran, disiplin, kerja sama, dan kepedulian terhadap orang lain.

Setiawan (2021: 77–81) menyatakan bahwa : Karakter peserta didik adalah kombinasi dari kebiasaan, nilai, sikap, dan keterampilan sosial yang membangun kepribadian yang utuh. Pentingnya pendekatan holistik, yaitu melalui pengajaran nilai, pembiasaan, dan teladan dari guru serta kepala sekolah. Karakter yang terbentuk secara holistik akan menjadikan peserta didik mampu bertindak etis, bertanggung jawab, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan sosial.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakter peserta didik adalah gabungan nilai, sikap, kebiasaan, dan keterampilan yang membangun kepribadian anak dan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Pembentukan karakter tidak hanya bersifat teoretis, tetapi harus diinternalisasi melalui pengalaman belajar, interaksi sosial, dan pembiasaan yang konsisten. Karakter yang kuat mendukung kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, bertindak etis, berempati, serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi salah satu pilar utama dalam mencetak generasi yang berkompetensi, berintegritas, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan secara positif.

2.1.4.2 Tujuan dan Urgensi Pendidikan Karakter

Karakter peserta didik merupakan fondasi penting dalam membangun kepribadian, sikap, dan perilaku anak yang akan membimbing mereka dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi tantangan di masyarakat. Pendidikan karakter menekankan pengembangan aspek moral, sosial, dan emosional, bukan hanya kemampuan akademik semata. Pembentukan karakter yang baik pada peserta didik dapat tercapai melalui lingkungan belajar yang mendukung, kebijakan kepala sekolah, pembiasaan nilai-nilai positif, dan interaksi sosial yang konstruktif di sekolah. Karakter yang kuat akan membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, pengendalian diri, empati, tanggung jawab, dan keterampilan sosial yang diperlukan untuk menjadi individu yang berintegritas dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Nuryani (2024:2) pendidikan karakter dipahami sebagai suatu proses pengembangan karakter dan kemandirian peserta didik melalui pembiasaan nilai-nilai karakter secara terstruktur dan berkelanjutan. Dalam pendekatan yang ia gunakan, karakter siswa dibangun melalui tiga proses utama yaitu pengajaran (*teaching*), pembiasaan (*habituation*), dan penegakan aturan berdasarkan kurikulum, yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nilai-nilai karakter yang ditekankan meliputi kejujuran (*sidiq*), kemampuan menyampaikan (*tabligh*), dapat dipercaya (*amanah*), dan kecerdasan (*fatonah*), yang semua itu terintegrasi dalam model pembinaan karakter yang berbasis pada manajemen mutu melalui siklus *Plan-Do-Check-Action* (PDCA) agar dapat membangun siswa yang mandiri, bertanggung jawab, dan berperilaku baik

Rohmat (2020: 72–76) menyatakan bahwa : Karakter peserta didik adalah sekumpulan nilai dan prinsip yang membangun pola pikir, sikap, dan perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Karakter bukan sekadar konsep abstrak, tetapi tercermin dalam tindakan nyata dan kebiasaan peserta didik. Pembentukan karakter harus dilakukan secara konsisten melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan, dan interaksi sosial agar peserta didik dapat menginternalisasi nilai-nilai positif secara menyeluruh.

Herlina (2021: 54–59) menjelaskan bahwa : Karakter peserta didik mencakup dimensi moral, sosial, dan emosional yang saling berkaitan. Karakter terbentuk dari kombinasi pembelajaran nilai, pengalaman nyata, serta teladan dari guru, kepala sekolah, dan lingkungan keluarga. Karakter yang kuat akan membantu peserta didik mengembangkan kemampuan pengendalian diri, empati, tanggung jawab, dan sikap proaktif dalam menghadapi permasalahan.

Suhendi (2019: 88–93) berpendapat bahwa : Karakter peserta didik merupakan hasil internalisasi norma, etika, dan nilai budaya yang memengaruhi perilaku dan keputusan anak. Karakter dikembangkan melalui proses pendidikan formal, kegiatan ekstrakurikuler, serta praktik nilai dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pentingnya pembentukan karakter secara holistik agar peserta didik mampu menjadi individu yang berintegritas, mandiri, dan adaptif terhadap perubahan sosial dan akademik.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakter peserta didik merupakan gabungan nilai, norma, sikap, dan prinsip yang membangun perilaku dan kepribadian anak. Pembentukan karakter bukan proses

yang instan, melainkan melalui pendidikan yang terstruktur, pembiasaan, teladan dari guru dan kepala sekolah, serta pengalaman sosial di lingkungan sekolah dan keluarga. Karakter yang terbentuk dengan baik akan membekali peserta didik untuk bertindak etis, bertanggung jawab, disiplin, serta mampu menghadapi tantangan sosial dan akademik dengan baik. Dengan demikian, pendidikan karakter menjadi bagian integral dari upaya mencetak generasi yang berkompetensi, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

2.1.4.3 Komponen dan Nilai-Nilai Karakter

Komponen dan nilai-nilai karakter merupakan aspek fundamental dalam pembentukan kepribadian peserta didik karena mencakup unsur-unsur yang membimbing sikap, perilaku, dan keputusan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan akademik, tetapi juga pengembangan nilai moral, etika, sosial, dan emosional yang menjadi landasan perilaku positif. Komponen karakter meliputi aspek kognitif, afektif, dan konatif, yang masing-masing memengaruhi cara berpikir, merasakan, dan bertindak peserta didik. Sementara nilai-nilai karakter, seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, empati, kerja sama, dan kepedulian sosial, menjadi pedoman praktis yang diterapkan dalam interaksi sehari-hari. Pemahaman mengenai komponen dan nilai-nilai karakter penting agar kepala sekolah dan guru dapat merancang program pembiasaan, penguatan nilai, serta kegiatan pembelajaran yang mampu menumbuhkan karakter peserta didik secara holistik dan berkelanjutan.

Prastowo (2020: 65–70) membagi komponen karakter peserta didik menjadi tiga dimensi utama, yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam pembentukan karakter:

1. Dimensi Kognitif

Dimensi ini berkaitan dengan pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai moral dan etika. Peserta didik belajar mengenali konsep baik dan buruk, memahami aturan sosial, serta menilai konsekuensi dari tindakan mereka. Penekanan pada dimensi kognitif memungkinkan anak mampu berpikir kritis tentang nilai-nilai yang dianut dan menginternalisasikannya ke dalam pola pikir.

2. Dimensi Afektif

Dimensi afektif menyangkut perasaan, sikap, dan emosi peserta didik terhadap nilai-nilai karakter. Misalnya, peserta didik tidak hanya mengetahui pentingnya kejujuran, tetapi juga memiliki rasa hormat dan kepedulian yang tulus terhadap nilai tersebut. Dimensi ini penting karena karakter yang kuat tercermin dari sikap dan perasaan yang konsisten terhadap nilai positif.

3. Dimensi Psikomotorik

Dimensi psikomotorik berkaitan dengan penerapan nilai dalam tindakan nyata. Peserta didik diajarkan untuk mengimplementasikan nilai-nilai seperti disiplin, kerja sama, dan tanggung jawab melalui perilaku sehari-hari, baik di kelas, di lingkungan sekolah, maupun di masyarakat. Dimensi ini menjembatani pemahaman dan sikap menjadi tindakan nyata yang membangun karakter utuh.

Pendapat Hidayat (2021: 42–46) menekankan pada nilai-nilai karakter yang bersifat praktis dan harus diterapkan secara konsisten:

1. Kejujuran

Peserta didik diajarkan untuk selalu berkata dan bertindak jujur, baik dalam belajar maupun dalam interaksi sosial. Kejujuran menjadi dasar integritas yang menuntun perilaku peserta didik agar dapat dipercaya oleh orang lain.

2. Tanggung Jawab dan Disiplin

Nilai ini mendorong peserta didik untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, mematuhi aturan, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Disiplin menjadi wujud konkret dari internalisasi nilai tanggung jawab.

3. Empati dan Kerja Sama

Peserta didik belajar memahami perasaan orang lain, menghargai pendapat teman, serta bekerja sama dalam kelompok. Nilai ini memperkuat keterampilan sosial dan membangun perilaku yang peduli terhadap lingkungan sekitar.

Suryani (2019: 78–83) menekankan pentingnya integrasi ketiga komponen agar pembentukan karakter bersifat holistik:

1. Komponen Kognitif

Menekankan pada kemampuan peserta didik memahami nilai-nilai karakter dan mengaitkannya dengan situasi nyata. Misalnya, memahami makna tanggung jawab dan konsekuensi dari perbuatan sendiri.

2. Komponen Afektif

Mencakup kemampuan merasakan dan mengekspresikan nilai, seperti memiliki empati, rasa hormat, dan kepedulian terhadap orang lain. Komponen ini menumbuhkan kesadaran moral dan motivasi internal untuk bertindak sesuai nilai.

3. Komponen Sosial-Emosional

Berkaitan dengan kemampuan peserta didik mengelola emosi, berinteraksi dengan teman sebaya, guru, dan masyarakat secara positif. Komponen ini mendorong penerapan nilai karakter dalam konteks sosial sehingga karakter menjadi nyata dan dapat diamati dalam perilaku sehari-hari.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa komponen dan nilai-nilai karakter peserta didik mencakup dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang saling terkait dan mendukung penerapan nilai dalam perilaku nyata. Nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, empati, dan kerja sama menjadi pedoman yang membangun perilaku positif peserta didik. Pembentukan karakter yang efektif membutuhkan pendekatan holistik melalui integrasi pembelajaran, pembiasaan, teladan, dan dukungan lingkungan sekolah serta keluarga. Dengan pemahaman yang tepat mengenai komponen dan nilai-nilai karakter, kepala sekolah dan guru dapat merancang strategi pendidikan yang mampu menghasilkan peserta didik yang berintegritas, bertanggung jawab, dan adaptif terhadap dinamika sosial dan akademik.

2.1.4.4 Metode Pembentukan Karakter

Metode pembentukan karakter merupakan serangkaian cara, strategi, dan pendekatan yang digunakan dalam proses pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian positif kepada peserta didik. Dalam konteks pendidikan, pembentukan karakter tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga menyentuh ranah afektif dan psikomotorik sehingga individu mampu memahami, merasakan, sekaligus mengamalkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, metode pembentukan karakter harus dirancang secara sistematis, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam seluruh aktivitas pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pendekatan yang digunakan pun perlu mempertimbangkan keteladanan, pembiasaan, penguatan nilai, serta keterlibatan aktif peserta didik agar nilai yang ditanamkan tidak sekadar dipahami, tetapi juga menjadi bagian dari kepribadian yang melekat.

Berikut ini diuraikan metode pembentukan karakter dalam bentuk pointer menurut masing-masing teori yang antara lain.

Menurut Samani (2012:146–148), menyatakan bahwa metode pembentukan karakter dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut :

a. Penanaman Nilai (*Inculcation*)

Metode ini dilakukan dengan memperkenalkan dan menegaskan nilai-nilai tertentu secara langsung kepada peserta didik. Guru menjelaskan makna nilai, alasan pentingnya nilai tersebut, serta konsekuensi jika nilai tidak diterapkan. Proses ini membantu peserta didik memiliki landasan moral yang jelas dalam bertindak.

b. Keteladanan (*Modeling*)

Pendidik dan seluruh warga sekolah menjadi contoh konkret dalam menerapkan nilai karakter. Konsistensi antara ucapan dan tindakan guru menjadi faktor utama keberhasilan metode ini karena peserta didik belajar melalui pengamatan dan peniruan.

c. Fasilitasi Pengambilan Keputusan Moral

Peserta didik dilatih untuk menganalisis permasalahan moral, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan menentukan keputusan yang bertanggung jawab. Metode ini mendorong berkembangnya kemampuan berpikir kritis dan kesadaran etis.

d. Pengembangan Keterampilan Sosial

Karakter dibentuk melalui latihan keterampilan seperti kerja sama, komunikasi, empati, dan tanggung jawab sosial sehingga peserta didik mampu menerapkan nilai dalam interaksi nyata.

Selanjutnya menurut Kesuma (2018:9–12) menyatakan bahwa metode pembentukan karakter antara lain :

a. Integrasi Nilai dalam Pembelajaran

Nilai karakter tidak diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah, melainkan diintegrasikan dalam setiap proses pembelajaran. Guru menyisipkan pesan moral dalam materi akademik sehingga nilai dan pengetahuan berkembang secara bersamaan.

b. Keteladanan Pendidik

Guru berperan sebagai figur sentral yang menunjukkan perilaku disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Keteladanan menjadi sarana paling efektif dalam membangun kesadaran karakter peserta didik.

c. Pembiasaan (*Habituation*)

Nilai ditanamkan melalui kegiatan rutin seperti doa bersama, upacara, budaya antre, dan disiplin waktu. Pembiasaan yang konsisten akan membangun pola perilaku yang menetap.

d. Penciptaan Budaya Sekolah yang Kondusif

Lingkungan sekolah dirancang agar mencerminkan nilai-nilai positif, baik melalui aturan, simbol, maupun interaksi sosial, sehingga peserta didik terbiasa hidup dalam suasana yang berkarakter.

Wibowo (2022: 83–87) menyatakan bahwa metode pembentukan karakter antara lain sebagai berikut :

a. Pembelajaran Berbasis Nilai (*Value-Based Learning*)

Proses pembelajaran dirancang untuk menanamkan nilai melalui diskusi, studi kasus, dan refleksi sehingga peserta didik memahami makna nilai secara mendalam.

b. Refleksi dan Internalisasi

Peserta didik diajak melakukan perenungan terhadap pengalaman belajar maupun peristiwa sehari-hari agar nilai yang dipelajari benar-benar tertanam dalam kesadaran pribadi.

c. Penguatan (*Reinforcement*)

Perilaku positif diberikan apresiasi atau penghargaan, sedangkan perilaku negatif diberi pembinaan. Penguatan ini bertujuan membangun konsistensi perilaku yang sesuai nilai karakter.

d. Keterlibatan Orang Tua dan Lingkungan

Pembentukan karakter tidak hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Sinergi lingkungan akan memperkuat internalisasi nilai secara berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode pembentukan karakter merupakan proses yang komprehensif dan terintegrasi antara pemberian pengetahuan nilai, penumbuhan kesadaran emosional, serta pembiasaan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan karakter tidak dapat dilakukan secara instan atau parsial, melainkan membutuhkan keteladanan pendidik, dukungan lingkungan, serta strategi yang sistematis dan berkelanjutan. Dengan penerapan metode yang tepat, pendidikan karakter akan mampu membangun individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab, dan kepedulian sosial yang kuat.

2.1.4.5 Faktor-Faktor Pembentuk Karakter

Faktor-faktor pembentuk karakter merupakan berbagai unsur yang memengaruhi proses berkembangnya nilai, sikap, dan perilaku individu sehingga membangun kepribadian yang khas. Karakter tidak lahir secara instan, melainkan terbentuk melalui interaksi yang dinamis antara potensi internal individu dan

pengaruh lingkungan eksternal. Dalam konteks pendidikan, memahami faktor-faktor pembentuk karakter menjadi penting agar proses pembinaan dapat dilakukan secara terarah, komprehensif, dan berkelanjutan. Para ahli pendidikan Indonesia menegaskan bahwa pembentukan karakter dipengaruhi oleh aspek keluarga, sekolah, lingkungan sosial, media, serta kondisi psikologis individu itu sendiri. Berikut ini diuraikan faktor-faktor pembentuk karakter yang antara lain :

Menurut Marzuki (2021: 58–63) menyatakan bahwa faktor-faktor pembentuk karakter antara lain :

1. Keluarga

Keluarga merupakan faktor utama dalam pembentukan karakter karena menjadi lingkungan pertama tempat anak belajar nilai dan norma. Pola asuh, keteladanan orang tua, serta komunikasi dalam keluarga sangat menentukan pembentukan sikap disiplin, tanggung jawab, dan empati.

2. Sekolah

Sekolah berperan dalam memperkuat nilai yang telah ditanamkan di keluarga melalui pembelajaran, budaya sekolah, dan interaksi sosial. Guru sebagai figur teladan menjadi kunci dalam membangun karakter peserta didik.

3. Lingkungan Sosial

Teman sebaya dan masyarakat sekitar turut memengaruhi perkembangan karakter. Lingkungan sosial yang positif akan mendorong terbentuknya perilaku yang sesuai norma, sedangkan lingkungan negatif dapat melemahkan nilai yang telah ditanamkan.

4. Media dan Teknologi

Perkembangan teknologi digital memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan karakter. Konten media yang dikonsumsi anak dapat membangun pola pikir, gaya hidup, serta nilai yang dianut.

5. Kesadaran Diri Individu

Faktor internal berupa kemauan, motivasi, dan kontrol diri sangat menentukan keberhasilan pembentukan karakter. Individu yang memiliki kesadaran moral akan lebih mampu mempertahankan nilai positif dalam berbagai situasi.

Selanjutnya Zubaedi (2022:112–118), menyatakan bahwa :

1. Nilai Religius

Ajaran agama menjadi landasan moral yang membimbing perilaku individu. Internalisasi nilai religius membantu membangun integritas dan tanggung jawab moral.

2. Budaya dan Tradisi

Nilai budaya lokal memengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang. Tradisi yang menjunjung tinggi gotong royong, sopan santun, dan kebersamaan akan memperkuat karakter sosial.

3. Sistem Pendidikan

Kurikulum, metode pembelajaran, dan kebijakan sekolah menentukan efektivitas pembentukan karakter. Pendidikan yang menekankan keseimbangan kognitif dan afektif lebih efektif dalam membangun kepribadian utuh.

4. Keteladanan Pemimpin dan Figur Publik

Tokoh masyarakat, pemimpin, dan figur publik menjadi contoh yang memengaruhi perilaku generasi muda. Konsistensi perilaku mereka akan memperkuat nilai positif dalam masyarakat.

5. Lingkungan Pergaulan

Interaksi dengan teman sebaya membangun pola perilaku sosial. Kelompok pergaulan yang konstruktif akan memperkuat sikap tanggung jawab dan solidaritas.

Sedangkan Wibowo (2023:74–80), menyatakan bahwa :

1. Potensi Bawaan (Faktor Internal)

Setiap individu memiliki karakter dasar atau temperamen yang menjadi fondasi perkembangan kepribadian. Potensi ini perlu diarahkan melalui pendidikan dan pembinaan.

2. Pola Asuh Orang Tua

Cara orang tua mendidik, memberi perhatian, dan menerapkan disiplin sangat memengaruhi pembentukan sikap anak, baik dalam hal tanggung jawab maupun kemandirian.

3. Iklim Sekolah

Suasana belajar yang aman, nyaman, dan penuh penghargaan terhadap nilai moral akan mendorong perkembangan karakter positif.

4. Pengalaman Hidup

Pengalaman keberhasilan, kegagalan, maupun tantangan hidup membangun ketahanan mental dan kedewasaan individu dalam mengambil keputusan.

5. Pengaruh Globalisasi

Arus informasi global membawa nilai baru yang dapat memperkaya maupun menggeser nilai lokal. Kemampuan menyaring informasi menjadi kunci dalam menjaga karakter.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pembentuk karakter bersifat multidimensional, meliputi faktor internal individu serta faktor eksternal seperti keluarga, sekolah, lingkungan sosial, budaya, media, dan arus globalisasi. Ketiga teori di atas menunjukkan bahwa pembentukan karakter tidak dapat dibebankan pada satu institusi saja, melainkan membutuhkan sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, kesadaran diri individu menjadi penentu utama dalam menginternalisasi nilai yang diterima dari lingkungan. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor tersebut, upaya pembinaan karakter dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan sehingga mampu membangun pribadi yang berintegritas, adaptif, serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

2.1.5 Penguatan Regulasi Kebijakan Kepala Sekolah dalam Membangun Karakter Peserta Didik

Penguatan regulasi kebijakan kepala sekolah dalam membangun karakter peserta didik merupakan langkah strategis yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi kepemimpinan pendidikan di satuan sekolah. Sekolah sebagai lembaga formal bukan hanya berperan dalam mentransfer pengetahuan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk membangun sikap, nilai, dan kepribadian peserta didik agar tumbuh menjadi individu yang berintegritas, disiplin, dan bertanggung

jawab. Dalam konteks tersebut, kepala sekolah memegang posisi sentral sebagai pengambil kebijakan yang mampu menerjemahkan tujuan pendidikan nasional ke dalam aturan, program, dan budaya sekolah yang konkret serta berkelanjutan.

Penguatan regulasi tidak sekadar berarti mempertegas tata tertib atau menambah aturan administratif, melainkan mengoptimalkan kebijakan agar benar-benar terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari warga sekolah. Regulasi yang dirancang secara sistematis, dilandasi visi yang jelas, serta ditegakkan secara konsisten akan membangun kultur sekolah yang kondusif bagi perkembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, penguatan kebijakan kepala sekolah menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa proses pendidikan tidak hanya menghasilkan capaian akademik, tetapi juga membangun generasi yang berkarakter kuat dan berdaya saing.

Dalam konteks pembangunan karakter peserta didik, kepala sekolah berperan sebagai manajer sekaligus pemimpin pembelajaran yang bertanggung jawab menyusun kebijakan berbasis kebutuhan sekolah serta mengintegrasikannya ke dalam budaya dan praktik pendidikan. Mulyasa (2022:52) menyatakan sebagai berikut :

1. Identifikasi Nilai dan Analisis Kebutuhan

Perencanaan kebijakan harus diawali dengan analisis kebutuhan (*needs assessment*) untuk mengetahui kondisi riil peserta didik dan budaya sekolah. Proses ini menjadi dasar dalam menentukan nilai karakter yang diprioritaskan.

2. Perumusan Visi, Misi, dan Landasan Normatif

Pada tahap perencanaan strategis, kepala sekolah merumuskan visi dan misi yang selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Visi tersebut menjadi pijakan normatif dalam menyusun regulasi sekolah.

3. Penyusunan Regulasi dan Strategi Implementasi

Kebijakan harus dituangkan dalam aturan operasional yang jelas serta diikuti strategi implementasi, seperti sosialisasi, pembinaan, dan integrasi dalam pembelajaran.

4. Penguatan melalui Keteladanan dan Budaya Sekolah

Dalam perspektif kepemimpinan pendidikan, keteladanan kepala sekolah merupakan faktor utama keberhasilan kebijakan. Budaya sekolah yang positif akan memperkuat internalisasi nilai karakter.

5. Monitoring, Evaluasi, dan Revisi Kebijakan

Evaluasi berkala diperlukan untuk menilai efektivitas kebijakan dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penguatan regulasi kebijakan kepala sekolah merupakan instrumen strategis dalam membangun karakter peserta didik secara sistematis dan berkelanjutan. Regulasi yang dirumuskan melalui analisis kebutuhan, diselaraskan dengan visi dan misi sekolah, serta berlandaskan pada nilai-nilai pendidikan nasional akan memiliki arah yang jelas dalam membangun perilaku dan budaya sekolah. Kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi menjadi

pedoman moral dan operasional yang mengarahkan seluruh aktivitas pendidikan menuju pembentukan karakter yang utuh.

Selain itu, efektivitas penguatan regulasi sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi, keteladanan pimpinan, serta evaluasi berkelanjutan. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa regulasi tidak berhenti pada tataran dokumen, melainkan terinternalisasi dalam sikap dan tindakan warga sekolah. Dengan demikian, penguatan regulasi kebijakan kepala sekolah menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berkarakter, disiplin, dan berorientasi pada pengembangan kepribadian peserta didik secara menyeluruh.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Implikasi hasil penelitian
1	Dina Lestari (2022)	Kebijakan kepala sekolah dalam pemebntukan karakter peserta didik di SMK Muhammadiyah Kota Tegal	Kebijakan kepala sekolah dalam pembentukan karakter peserta didik di SMK Muhammadiyah Kota Tegal dilakukan melalui berbagai kegiatan dan program yang berada di sekolah, antara lain pembiasaan sehari-	Kebijakan kepala sekolah dalam pembentukan karakter peserta didik memiliki implikasi strategis terhadap penguatan budaya sekolah, peningkatan kualitas perilaku siswa, serta terciptanya lingkungan pendidikan yang religius, disiplin, dan berorientasi pada nilai

			hari yaitu penegakkan kedisiplinan dan tata tertib siswa termasuk guru dan karyawan. Seain itu juga penanaman kedisiplinan, sopan santun, tata tertib, peduli lingkungan, shalat dhuha, dan shalat berjamaah. Melalui program unggulan Pelajaran Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja (P BK) Kurikulum SMK Pusat Keunggulan (PK) yaitu kunjungan ke Polsek, Kunjungan ke Panti Asuhan (PA), dan Kebersihan lingkungan, SMK ini berusaha maksimal mewujudkan pendidikan karakter.	
2	Poppy Rosman Ninsi (2021)	Pelaksanaan Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Penguatan Karakter Peserta Didik Di Sman Bunga Bangsa Nagan Raya	Pelaksanaan kebijakan kepala sekolah dalam penguatan karakter kejujuran dilakukan melalui 4 tahapan yaitu pengorganisasian, interpretasi kebijakan, aplikasi atau penerapan kebijakan, dan evaluasi kebijakan	Pelaksanaan kebijakan kepala sekolah dalam penguatan karakter peserta didik berimplikasi pada terbentuknya budaya sekolah yang lebih disiplin, religius, dan berorientasi pada nilai-nilai integritas serta tanggung jawab.
3	Mesiono (2024)	Kebijakan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Karakter	Kebijakan Kepala Madrasah dalam meningkatkan karakter kedisiplinan	Kebijakan Kepala Madrasah dalam meningkatkan karakter kedisiplinan belajar

		Kedisiplinan Belajar Siswa di MTsN 4 Padang Lawas	belajar siswa di MTsN 4 Padang Lawas dilaksanakan melalui empat hal yaitu, a) Penegakan aturan dan disiplin, b) Membuat sistem reward dan punishment, c) Pengawasan dan monitoring, d) kolaborasi untuk menciptakan minat belajar siswa	berimplikasi pada terbentuknya budaya belajar yang tertib, konsisten, dan berorientasi pada tanggung jawab akademik siswa.
4	Rodiyatul Adawiyah		Kebijakan sekolah berupa program pembiasaan religius seperti membawa dan membaca Al-Qur'an, pembacaan Asmaul Husna, salat berjamaah, kegiatan IMTAQ, serta kewajiban berpakaian sesuai syariat memberikan pengaruh positif terhadap kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap saling menghormati.	Perlunya evaluasi berkelanjutan, keterlibatan aktif siswa, serta pengembangan kegiatan ekstrakurikuler religius untuk memperkuat pembinaan karakter secara holistik
5	Giantomi Muhammad (2021)	Kebijakan Program Pembiasaan Sekolah dalam Membangun Karakter Disiplin di SMP Negeri	Kebijakan program pembiasaan yang dilaksanakan di SMP Negeri 40 Bandung mencakup pembiasaan literasi, salat Duha, tadarus Al-Qur'an, olahraga pagi, kerja bakti mingguan dan <i>leadership</i> . Kegiatan tersebut berdampak pada kepribadian peserta didik	Memberikan implikasi yang komprehensif terhadap sistem pengelolaan sekolah, pola interaksi warga sekolah, serta kualitas perilaku peserta didik

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu, terdapat persamaan, perbedaan, sekaligus keunikan yang membedakan penelitian ini dengan kajian sebelumnya. Persamaannya terletak pada fokus yang sama-sama menyoroti kebijakan dan peran kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun serta memperkuat karakter peserta didik melalui program yang terencana dan berkelanjutan, dengan menempatkan kepala sekolah sebagai figur strategis dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan karakter yang melibatkan guru, peserta didik, dan orang tua. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan pada kedalaman analisis dan sudut pandang kajian, karena tidak hanya mendeskripsikan implementasi kebijakan atau program pembiasaan secara umum, tetapi juga mengkaji secara komprehensif strategi perumusan kebijakan, proses internalisasi nilai karakter dalam budaya sekolah, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitasnya. Keunikan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi antara aspek kebijakan, praktik kepemimpinan, dan dinamika budaya sekolah dalam satu kerangka analisis yang utuh, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai bagaimana kebijakan kepala sekolah diimplementasikan secara kontekstual dan berkelanjutan dalam membangun karakter peserta didik.

2.3 Pendekatan Masalah

Penguatan regulasi kebijakan kepala sekolah dalam membangun karakter peserta didik di SMP merupakan isu strategis dalam konteks manajemen pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar menengah pertama. Kepala

sekolah tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin pendidikan yang memiliki kewenangan merumuskan, menetapkan, dan mengimplementasikan kebijakan sekolah yang berorientasi pada pembentukan karakter. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan masalah terhadap tema ini diarahkan untuk memahami secara mendalam bagaimana proses perumusan, pelaksanaan, serta penguatan regulasi dilakukan, bagaimana makna kebijakan tersebut dipahami oleh warga sekolah, serta bagaimana kebijakan itu berdampak terhadap pembentukan karakter peserta didik dalam praktik sehari-hari.

Secara teoretis, pendekatan masalah ini dapat dihubungkan dengan teori kepemimpinan pendidikan dan kebijakan sekolah. Menurut Mulyasa (2022: 45–47), menyatakan bahwa : ”Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan berbasis nilai yang menjadi pedoman perilaku seluruh warga sekolah”. Kebijakan yang kuat dan konsisten akan membangun budaya sekolah yang kondusif bagi pengembangan karakter peserta didik. Regulasi sekolah harus dirancang secara partisipatif, disosialisasikan secara jelas, serta ditegakkan secara konsisten agar mampu membangun disiplin dan tanggung jawab.

Selanjutnya, menurut Danim (2021:103–105), menyatakan bahwa :”Penguatan kebijakan sekolah berkaitan erat dengan fungsi manajerial kepala sekolah dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan”. Dalam konteks pendidikan karakter, regulasi tidak cukup dituangkan dalam dokumen tertulis, tetapi harus diinternalisasikan melalui pembiasaan, keteladanan, dan budaya organisasi. Pendekatan ini menempatkan kepala sekolah sebagai agen

perubahan (*change agent*) yang memastikan kebijakan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Zubaedi (2023 : 189–193) menjelaskan bahwa keberhasilan penguatan regulasi dalam pendidikan karakter sangat ditentukan oleh integrasi nilai dalam sistem sekolah, termasuk tata tertib, program pembiasaan, kegiatan ekstrakurikuler, serta sistem penghargaan dan sanksi. Regulasi yang berbasis nilai moral dan religius akan membangun kultur sekolah yang mendukung internalisasi karakter peserta didik secara konsisten.

Penguatan regulasi kebijakan kepala sekolah dalam membangun karakter peserta didik menurut Mulyasa (2022:52) dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut :

1. Identifikasi nilai dan analisis kebutuhan karakter peserta didik;
2. Perumusan visi, misi, dan landasan normatif kebijakan;
3. Penyusunan regulasi dan strategi implementasi;
4. Penguatan melalui keteladanan dan budaya sekolah;
5. Monitoring, evaluasi, dan revisi kebijakan.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan masalah dalam penelitian kualitatif mengenai penguatan regulasi kebijakan kepala sekolah difokuskan pada pemahaman mendalam terhadap proses perumusan kebijakan, strategi implementasi, konsistensi penegakan aturan, serta dinamika budaya sekolah yang terbentuk. Teori kepemimpinan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah menjadi penghubung yang menjelaskan bahwa regulasi bukan

sekadar aturan administratif, melainkan instrumen strategis dalam membangun karakter peserta didik melalui budaya sekolah yang terstruktur dan bernilai.

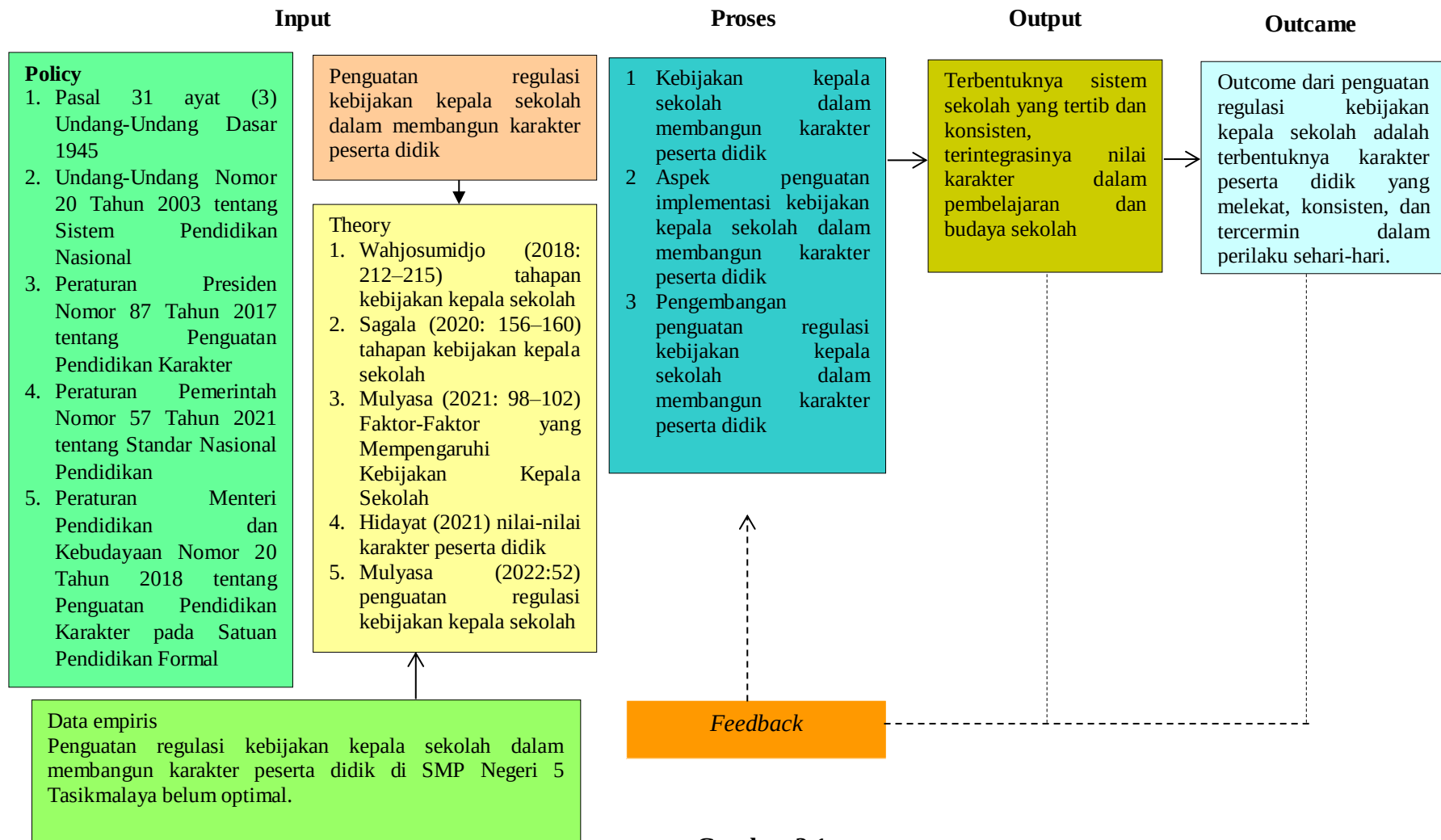
Adapun penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan dukungan empiris terhadap pentingnya penguatan regulasi kepala sekolah. Penelitian oleh Rahmawati (2021) menemukan bahwa konsistensi penerapan tata tertib dan program pembiasaan di SMP mampu meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab peserta didik. Penelitian Pratama (2022) menunjukkan bahwa kebijakan kepala sekolah yang berbasis partisipatif dan melibatkan guru serta orang tua berkontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter religius dan sosial siswa. Selain itu, penelitian Hidayat (2023) mengungkapkan bahwa pengawasan dan evaluasi kebijakan secara berkala menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program pendidikan karakter di tingkat SMP.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penguatan regulasi kebijakan kepala sekolah berperan signifikan dalam membangun karakter peserta didik apabila dirancang secara partisipatif, dilaksanakan secara konsisten, serta didukung oleh budaya sekolah yang kondusif. Kebaruan penelitian mengenai Penguatan Regulasi Kebijakan Kepala Sekolah dalam Membangun Karakter Peserta Didik di SMP terletak pada fokus analisis yang lebih mendalam terhadap aspek penguatan regulasi sebagai proses strategis dan berkelanjutan, bukan sekadar implementasi program pendidikan karakter. Jika penelitian terdahulu seperti Rahmawati (2021), Pratama (2022), dan Hidayat (2023) lebih menitikberatkan pada efektivitas tata tertib, program pembiasaan, atau partisipasi warga sekolah dalam mendukung karakter siswa, maka penelitian ini

menghadirkan perspektif yang berbeda dengan menelaah bagaimana kepala sekolah memperkuat regulasi melalui perumusan kebijakan, legitimasi aturan, mekanisme sosialisasi, konsistensi penegakan, serta sistem evaluasi yang terintegrasi dalam budaya sekolah. Kebaruan lainnya terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif yang menggali makna, dinamika, dan praktik kepemimpinan kepala sekolah secara kontekstual di SMP, sehingga mampu mengungkap proses internal penguatan kebijakan sebagai instrumen pembentuk kultur karakter. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji hasil atau dampak kebijakan, tetapi juga menyoroti proses strategis dan kepemimpinan regulatif yang menjadi fondasi terbentuknya karakter peserta didik secara sistematis dan berkelanjutan.

2.4 Kerangka Berfikir

Struktur konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis data kualitatif dapat disajikan dalam bentuk bagan kerangka berfikir yang menjelaskan hubungan antar konsep-konsep kunci dan kategori-kategori. Berdasarkan uraian yang dijadikan pendekatan masalah dalam penelitian ini maka apabila diuraikan dalam bagan kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir